

## SD-SMP Berhak Menolak Dana BOS

**CANDISARI** - Sejumlah SD dan SMP elite di Kota Semarang menolak pemberian dana Bantuan Operasional Siswa (BOS). Hal tersebut menurut Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Semarang, Soedjono, merupakan hak dari pihak sekolah yang bersangkutan. "Tergantung kesepakatan sekolah dan komite sekolah ataupun yayasan. Mereka dapat menolak," ujar Soedjono saat ditemui *Radar Semarang* di kantornya, Jumat (29/8).

Dikatakan, hal tersebut sudah diatur dalam Peraturan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No 101 tahun 2013 berlaku untuk tahun 2014.

"Itu untuk kategori SD dan SMP semua sudah diatur di situ. Jika sekolah yang bersangkutan dapat menolak dana BOS, asalkan ada persetujuan antara komite, yayasan dan pihak sekolah itu," jelasnya.

Dikatakan, mekanisme penyaluran dana BOS bagi SD maupun SMP diberikan oleh pemerintah pusat yang disampaikan ke pemerintah daerah.

► Baca **SD-SMP ...** hal 33

## Terima BOS, Sekolah Akan Diaudit BPK

### ■ SD-SMP

*Sambungan dari hal. 25*

Setelah sampai di pemerintah daerah, baru didistribusikan ke sekolah masing-masing. "Namun untuk SMA, penyaluran dana BOS didistribusikan langsung dari pemerintah pusat ke SMA yang dituju," katanya.

Besaran dana BOS pada 2014 setiap sekolah, menurut Soedjono, tidak sama. Karena tergantung jumlah siswa. "Kebutuhan dana BOS sesuai dengan jumlah siswa. Untuk SD, setiap siswanya mendapatkan Rp 580 ribu per tahun, untuk SMP Rp 710 ribu setiap tahun, dan SMA Rp 1 juta setiap tahun. Dana tersebut disalurkan setiap triwulan," bebernya.

Soedjono menambahkan, bagi sekolah yang menolak pemberian dan BOS, konsekuensinya jika di dalam sekolah tersebut terdapat siswa miskin, maka pihak sekolah wajib membebaskan siswa miskin tersebut dari SPP maupun pungutan yang lain. "Itu sudah menjadi konsekuensi sekolah yang menolak dana BOS. Jika pihak sekolah tidak membebaskan siswa miskin tersebut, maka pihak sekolah yang bersangkutan dapat dikenai sanksi," katanya.

Selain di Kota Semarang, sejumlah sekolah di Jateng dari berbagai jenjang diketahui menolak dana BOS. Sekolah yang menolak BOS terutama sekolah swasta yang dikenal elite dan menerapkan standar internasional. Di antaranya, sejumlah sekolah di Solo dan Sukoharjo. Sebab, dengan menerima BOS, sekolah tak lagi boleh melakukan pungutan kepada siswa. Hanya diperbolehkan menerima sumbangan yang besaran dan waktunya tidak mengikat. Selain itu, sekolah tersebut akan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau auditor negara karena



### SD-SMP di Jateng Tolak Dana BOS

#### KOTA SOLO:

- ◆ SD Focus Independen
- ◆ SD SD Kristen Pelita Nusantara Kasih
- ◆ SD SMP Kristen Pelita Nusantara

#### KABUPATEN SUKOHARJO:

- ◆ SD Singapore Piagent Academy
- ◆ SMP Piagent Academy

#### KOTA SEMARANG:

- ◆ SD Bina Bangsa School
- ◆ SD Permata Bangsa School
- ◆ SD Stamford International
- ◆ SD Mondial
- ◆ SD Maria Regina
- ◆ SD Kristen Tri Tunggal
- ◆ SD Karangturi
- ◆ SD Singapore School
- ◆ SD Cambridge
- ◆ SMP Permata Bangsa
- ◆ SMP Bina Bangsa
- ◆ SMP Maria Regina
- ◆ SMP Karang Turi

SUMBER: DINAS PENDIDIKAN JAWA TENGAH

telah menerima uang negara. Penerimaan dana BOS juga harus disertai pengisian kelengkapan daftar pokok pendidikan.

"Karena penerimaan dana BOS harus disertai pengisian data pokok pendidikan, dan setiap penerima uang negara harus diaudit," kata Kepala Dinas Pendidikan Jateng Nurhadi Amiyanto melalui Kepala Seksi Pendidikan Dasar dan Menengah Dinas Pendidikan Provinsi Jateng Eris Yuniyanto. (**ewb/aro/ce1**)